



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur serta tercapainya tertib penyusutan arsip substantif di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, perlu disusun Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 24/PER/MENKO/KESRA/VII/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

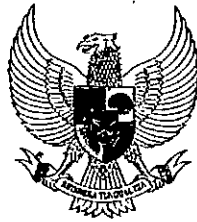
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.**

Pasal 1

Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah acuan bagi unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyusutan arsip substantif.

Pasal 2 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 April 2014

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AGUNG LAKSONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juli 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1007

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sugihartatmo P.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2014

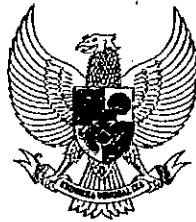
TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
I	LINGKUNGAN HIDUP DAN KERAWANAN SOSIAL			
1.	Pelestarian dan Pemulihan Lingkungan Hidup			
a.	Rapat koordinasi tentang Pelestarian dan Pemulihan Lingkungan Hidup	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen
b.	Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Pelestarian dan Pemulihan Lingkungan Hidup	2 tahun	2 tahun	musnah
c.	Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Pelestarian dan Pemulihan Lingkungan Hidup	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
d.	Monitoring dan evaluasi tentang Pelestarian dan Pemulihan Lingkungan Hidup	1 tahun	2 tahun	musnah

e. Sosialisasi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

1	2	3	4	5
	e. Sosialisasi tentang Pelestarian dan Pemulihan Lingkungan Hidup	1 tahun	2 tahun	musnah
	f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Pelestarian dan Pemulihan Lingkungan Hidup	1 tahun	2 tahun	musnah
2.	Bencana			
	a. Rapat koordinasi tentang Pengurangan resiko dan pemulihan pasca bencana	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen
	b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Pengurangan resiko dan pemulihan pasca bencana	2 tahun	2 tahun	musnah
	c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Pengurangan resiko dan pemulihan pasca bencana	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
	d. Monitoring dan evaluasi tentang Pengurangan resiko dan pemulihan pasca bencana	1 tahun	2 tahun	musnah
	e. Sosialisasi tentang Pengurangan resiko dan pemulihan pasca bencana	1 tahun	2 tahun	musnah
	f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 tahun	2 tahun	musnah
	g. Tanggap darurat bencana alam	2 tahun	3 tahun	permanen
3.	Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim			
	a. Rapat koordinasi tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen

b. Bahan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none">b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklimc. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklimd. Monitoring dan evaluasi tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklime. Sosialisasi tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklimf. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none">2 tahun2 tahun setelah buku terbit1 tahun1 tahun1 tahun	<ul style="list-style-type: none">2 tahun2 tahun2 tahun2 tahun2 tahun	<ul style="list-style-type: none">musnahmusnahmusnahmusnahmusnah
4.	<p>Konflik Sosial</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rapat koordinasi tentang Pencegahan Konflik Sosial dan Pemulihan Pasca Konflik Sosialb. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Pencegahan Konflik Sosial dan Pemulihan Pasca Konflik Sosialc. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Pencegahan Konflik Sosial dan Pemulihan Pasca Konflik Sosiald. Monitoring dan evaluasi tentang Pencegahan Konflik Sosial dan Pemulihan Pasca Konflik Sosial	<ul style="list-style-type: none">2 tahun2 tahun2 tahun setelah buku terbit1 tahun	<ul style="list-style-type: none">2 tahun2 tahun2 tahun2 tahun	<ul style="list-style-type: none">musnah kecuali rekomendasi permanenmusnahmusnahmusnah

e. Sosialisasi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none">e. Sosialisasi tentang Pencegahan Konflik Sosial dan Pemulihan Pasca Konflik Sosialf. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Pemulihan Pasca Konflik Sosialg. Tanggap darurat Konflik Sosial	<p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>musnah</p> <p>musnah</p> <p>Permanen</p>
II.	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PERUMAHAN RAKYAT			
1.	Kompensasi Sosial <ul style="list-style-type: none">a. Rapat koordinasi tentang Kompensasi pangan dan non panganb. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Kompensasi pangan dan non panganc. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Kompensasi pangan dan non pangand. Monitoring dan evaluasi tentang Kompensasi pangan dan non pangane. Sosialisasi tentang Kompensasi pangan dan non panganf. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Kompensasi pangan dan non pangan	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun setelah buku terbit</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>musnah kecuali rekomendasi permanen</p> <p>musnah</p> <p>musnah</p> <p>musnah</p> <p>musnah</p> <p>musnah</p>

2. Jaminan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

1	2	3	4	5
2.	Jaminan Sosial			
a.	Rapat koordinasi tentang Program dan kerja sama jaminan sosial	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen
b.	Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Program dan kerja sama jaminan sosial	2 tahun	2 tahun	musnah
c.	Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Program dan kerja sama jaminan sosial	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
d.	Monitoring dan evaluasi tentang Program dan kerja sama jaminan sosial	1 tahun	2 tahun	musnah
e.	Sosialisasi tentang Program dan kerja sama jaminan sosial	1 tahun	2 tahun	musnah
f.	Rekomendasi permohonan bantuan tentang Program dan kerja sama jaminan sosial	1 tahun	2 tahun	musnah
3.	Penyandang cacat dan Lanjut usia			
a.	Rapat koordinasi tentang Penyandang cacat dan lanjut usia	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen
b.	Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Penyandang cacat dan lanjut usia	2 tahun	2 tahun	musnah

c. Bahan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

1	2	3	4	5
	<p>c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Penyandang cacat dan lanjut usia</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi tentang Penyandang cacat dan lanjut usia</p> <p>e. Sosialisasi tentang Penyandang cacat dan lanjut usia</p> <p>f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Penyandang cacat dan lanjut usia</p>	<p>2 tahun setelah buku terbit</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>musnah</p> <p>musnah</p> <p>musnah</p> <p>musnah</p>
4.	<p>Perumahan dan Permukiman</p> <p>a. Rapat koordinasi tentang Perumahan dan pemukiman</p> <p>b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Perumahan dan pemukiman</p> <p>c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Perumahan dan pemukiman</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi tentang Perumahan dan pemukiman</p> <p>e. Sosialisasi tentang Perumahan dan pemukiman</p> <p>f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Perumahan dan pemukiman</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun setelah buku terbit</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>musnah kecuali rekomendasi permanen</p> <p>musnah</p> <p>musnah</p> <p>musnah</p> <p>musnah</p> <p>musnah</p>

III. KESEHATAN ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

1	2	3	4	5
III.	KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA			
1.	Penguatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit			
a.	Rapat koordinasi tentang Penanggulangan Penyakit menular dan tidak menular	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen
b.	Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Penanggulangan Penyakit menular dan tidak menular	2 tahun	2 tahun	musnah
c.	Bahan-bahan penyusunan Buku Penanggulangan Penyakit menular dan tidak menular	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
d.	Monitoring dan evaluasi tentang Penanggulangan Penyakit menular dan tidak menular	1 tahun	2 tahun	musnah
e.	Sosialisasi hasil koordinasi Penanggulangan Penyakit menular dan tidak menular	1 tahun	2 tahun	musnah
f.	Rekomendasi permohonan bantuan tentang sarana dan prasarana penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	1 tahun	2 tahun	musnah
2.	Pelayanan kesehatan			
a.	Rapat koordinasi tentang Pelayanan kesehatan	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen

b. Bahan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

1	2	3	4	5
	b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Pelayanan kesehatan	2 tahun	2 tahun	musnah
	c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Pelayanan kesehatan	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
	d. Monitoring dan evaluasi tentang Pelayanan kesehatan	1 tahun	2 tahun	musnah
	e. Sosialisasi hasil koordinasi tentang Pelayanan kesehatan	1 tahun	2 tahun	musnah
	f. Rekomendasi permohonan bantuan sarana dan prasarana kesehatan	1 tahun	2 tahun	musnah
3.	Penguatan ketahanan gizi dan kesehatan lingkungan			
	a. Rapat koordinasi tentang ketahanan gizi dan kesehatan lingkungan	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen
	b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang ketahanan gizi dan kesehatan lingkungan	2 tahun	2 tahun	musnah
	c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang ketahanan gizi dan kesehatan lingkungan	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
	d. Monitoring dan evaluasi tentang ketahanan gizi dan kesehatan lingkungan	1 tahun	2 tahun	musnah
	e. Sosialisasi hasil koordinasi tentang ketahanan gizi dan kesehatan lingkungan	1 tahun	2 tahun	musnah

f. Rekomendasi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

1	2	3	4	5
	f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang ketahanan gizi dan kesehatan lingkungan	1 tahun	2 tahun	musnah
4.	Kependudukan dan Keluarga Berencana			
	a. Rapat koordinasi tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen
	b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana	2 tahun	2 tahun	musnah
	c. Bahan-bahan penyusunan proceeding, buku tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
	d. Monitoring dan evaluasi tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana	1 tahun	2 tahun	musnah
	e. Sosialisasi hasil koordinasi tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana	1 tahun	2 tahun	musnah
	f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana	1 tahun	2 tahun	musnah
IV.	PENDIDIKAN DAN AGAMA			
1.	Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Masyarakat			
	a. Rapat koordinasi tentang Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Masyarakat	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen

b. Bahan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

1	2	3	4	5
	b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Masyarakat	2 tahun	2 tahun	musnah
	c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Masyarakat	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
	d. Monitoring dan evaluasi tentang Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Masyarakat	1 tahun	2 tahun	musnah
	e. Sosialisasi hasil koordinasi tentang Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Masyarakat	1 tahun	2 tahun	musnah
	f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Masyarakat	1 tahun	2 tahun	musnah
2.	Pendidikan Menengah dan Tinggi			
	a. Rapat koordinasi tentang Pendidikan Menengah dan Tinggi	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen
	b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Pendidikan Menengah dan Tinggi	2 tahun	2 tahun	musnah
	c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Pendidikan Menengah dan Tinggi	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
	d. Monitoring dan evaluasi tentang Pendidikan Menengah dan Tinggi	1 tahun	2 tahun	musnah

e. Sosialisasi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

1	2	3	4	5
	e. Sosialisasi hasil koordinasi tentang Pendidikan Menengah dan Tinggi	1 tahun	2 tahun	musnah
	f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Pendidikan Menengah dan Tinggi	1 tahun	2 tahun	musnah
3.	Pemberdayaan dan Kerukunan Beragama			
	a. Rapat koordinasi tentang Pemberdayaan dan Kerukunan Beragama	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen
	b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Pemberdayaan dan Kerukunan Beragama	2 tahun	2 tahun	musnah
	c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Pemberdayaan dan Kerukunan Beragama	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
	d. Monitoring dan evaluasi tentang Pemberdayaan dan Kerukunan Beragama	1 tahun	2 tahun	musnah
	e. Sosialisasi hasil koordinasi tentang Pemberdayaan dan Kerukunan Beragama	1 tahun	2 tahun	musnah
	f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Pemberdayaan dan Kerukunan Beragama	1 tahun	2 tahun	musnah
4.	Bimbingan umat beragama, Pendidikan agama dan keagamaan			
	a. Rapat koordinasi tentang Bimbingan umat beragama, Pendidikan agama dan keagamaan	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen

b. Bahan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

1	2	3	4	5
	b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Bimbingan umat beragama, Pendidikan agama dan keagamaan	2 tahun	2 tahun	musnah
	c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Bimbingan umat beragama, Pendidikan agama dan keagamaan	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
	d. Monitoring dan evaluasi tentang Bimbingan umat beragama, Pendidikan agama dan keagamaan	1 tahun	2 tahun	musnah
	e. Sosialisasi hasil koordinasi tentang Bimbingan umat beragama, Pendidikan agama dan keagamaan	1 tahun	2 tahun	musnah
	f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Bimbingan umat beragama, Pendidikan agama dan keagamaan	1 tahun	2 tahun	musnah
5.	Pembangunan Karakter Bangsa			
	a. Rapat koordinasi tentang Pembangunan Karakter Bangsa	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen
	b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Pembangunan Karakter Bangsa	2 tahun	2 tahun	musnah
	c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Pembangunan Karakter Bangsa	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
	d. Monitoring dan evaluasi tentang Pembangunan Karakter Bangsa	1 tahun	2 tahun	musnah

e. Sosialisasi ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

1	2	3	4	5
	e. Sosialisasi hasil koordinasi tentang Pembangunan Karakter Bangsa	1 tahun	2 tahun	musnah
	f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Pembangunan Karakter Bangsa	1 tahun	2 tahun	musnah
V.	KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1.	Kebudayaan			
	a. Rapat koordinasi tentang Kebudayaan	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen
	b. Bahan-bahan penyusunan kebijakan tentang Kebudayaan	2 tahun	2 tahun	musnah
	c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Kebudayaan	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
	d. Monitoring dan evaluasi tentang Kebudayaan	1 tahun	2 tahun	musnah
	e. Sosialisasi hasil koordinasi tentang Kebudayaan	1 tahun	2 tahun	musnah
	f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Kebudayaan	1 tahun	2 tahun	musnah
2.	Pariwisata			
	a. Rapat koordinasi tentang Pariwisata	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen

b. Bahan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

1	2	3	4	5
	b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Pariwisata	2 tahun	2 tahun	musnah
	c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Pariwisata	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
	d. Monitoring dan evaluasi tentang Pariwisata	1 tahun	2 tahun	musnah
	e. Sosialisasi hasil koordinasi tentang Pariwisata	1 tahun	2 tahun	musnah
	f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Pariwisata	1 tahun	2 tahun	musnah
3.	Pemuda			
	a. Rapat koordinasi tentang Pemuda	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen
	b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Pemuda	2 tahun	2 tahun	musnah
	c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Pemuda	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
	d. Monitoring dan evaluasi tentang Pemuda	1 tahun	2 tahun	musnah
	e. Sosialisasi hasil koordinasi tentang Pemuda	1 tahun	2 tahun	musnah
	f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Pemuda	1 tahun	2 tahun	musnah

4. Olahraga ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

1	2	3	4	5
4	Olahraga			
	a. Rapat koordinasi tentang Olahraga	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen
	b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Olahraga	2 tahun	2 tahun	musnah
	c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Olahraga	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
	d. Monitoring dan evaluasi tentang Olahraga	1 tahun	2 tahun	musnah
	e. Sosialisasi hasil koordinasi tentang Olahraga	1 tahun	2 tahun	musnah
	f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Olahraga	1 tahun	2 tahun	musnah
5.	Pengajuan Penghargaan dan Penghargaan/sertifikat Warisan Dunia dari UNESCO	-	-	Permanen
VI.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK			
1.	Kualitas Hidup Perempuan Fisik dan non fisik			
	a. Rapat koordinasi tentang Fisik dan non fisik	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen

b. Bahan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

1	2	3	4	5
	b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Fisik dan non fisik	2 tahun	2 tahun	musnah
	c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Fisik dan non fisik	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
	d. Monitoring dan evaluasi tentang Fisik dan non fisik	1 tahun	2 tahun	musnah
	e. Sosialisasi hasil koordinasi tentang Fisik dan non fisik	1 tahun	2 tahun	musnah
	f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Fisik dan non fisik	1 tahun	2 tahun	musnah
	g. World Food Programme (WFP)	1 tahun	2 tahun	musnah
2.	Keluarga dan kesejahteraan anak			
	a. Rapat koordinasi tentang Keluarga dan kesejahteraan anak	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen
	b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Keluarga dan kesejahteraan anak	2 tahun	2 tahun	musnah
	c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Keluarga dan kesejahteraan anak	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
	d. Monitoring dan evaluasi tentang Keluarga dan kesejahteraan anak	1 tahun	2 tahun	musnah
	e. Sosialisasi hasil koordinasi tentang Keluarga dan kesejahteraan anak	1 tahun	2 tahun	musnah

f. Rekomendasi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

1	2	3	4	5
	f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Keluarga dan kesejahteraan anak	1 tahun	2 tahun	musnah
3.	Kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga			
	a. Rapat koordinasi tentang Kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen
	b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga	2 tahun	2 tahun	musnah
	c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
	d. Monitoring dan evaluasi tentang Kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga	1 tahun	2 tahun	musnah
	e. Sosialisasi hasil koordinasi tentang Kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga	1 tahun	2 tahun	musnah
	f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga	1 tahun	2 tahun	musnah
	g. Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial	1 tahun	2 tahun	musnah
4.	Perlindungan perempuan dan anak			
	a. Rapat koordinasi tentang Korban tindak kekerasan termasuk perdagangan orang dan penanggulangan masalah sosial	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen

b. Bahan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

1	2	3	4	5
	b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Korban tindak kekerasan termasuk perdagangan orang dan penanggulangan masalah sosial	2 tahun	2 tahun	musnah
	c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Korban tindak kekerasan termasuk perdagangan orang dan penanggulangan masalah sosial	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
	d. Monitoring dan evaluasi tentang Korban tindak kekerasan termasuk perdagangan orang dan penanggulangan masalah sosial	1 tahun	2 tahun	musnah
	e. Sosialisasi hasil koordinasi tentang Korban tindak kekerasan termasuk perdagangan orang dan penanggulangan masalah sosial	1 tahun	2 tahun	musnah
	f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Korban tindak kekerasan termasuk perdagangan orang dan penanggulangan masalah sosial	1 tahun	2 tahun	musnah
VII.	PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
1.	Pengarusutamaan kebijakan dan anggaran			
	a. Rapat koordinasi tentang Pengarusutamaan kebijakan dan anggaran	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen
	b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Pengarusutamaan kebijakan dan anggaran	2 tahun	2 tahun	musnah

c. Bahan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

1	2	3	4	5
	<p>c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Pengarusutamaan kebijakan dan anggaran</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi tentang Pengarusutamaan kebijakan dan anggaran</p> <p>e. Sosialisasi hasil koordinasi tentang Pengarusutamaan kebijakan dan anggaran</p> <p>f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Pengarusutamaan kebijakan dan anggaran</p>	<p>2 tahun setelah buku terbit</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>musnah</p> <p>musnah</p> <p>musnah</p> <p>musnah</p>
2.	<p>Pemberdayaan masyarakat</p> <p>a. Rapat koordinasi tentang Perkotaan dan Pedesaan</p> <p>b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Perkotaan dan Pedesaan</p> <p>c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Perkotaan dan Pedesaan</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi tentang Perkotaan dan Pedesaan</p> <p>e. Sosialisasi hasil koordinasi tentang Perkotaan dan Pedesaan</p> <p>f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Perkotaan dan Pedesaan</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun setelah buku terbit</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>musnah kecuali rekomendasi permanen</p> <p>musnah</p> <p>musnah</p> <p>musnah</p> <p>musnah</p> <p>musnah</p>

3. Pengembangan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

1	2	3	4	5
3.	<p>Pengembangan kemitraan dan kelembagaan</p> <p>a. Rapat koordinasi tentang Pengembangan kemitraan dan kelembagaan</p> <p>b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Pengembangan kemitraan dan kelembagaan</p> <p>c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Pengembangan kemitraan dan kelembagaan</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi tentang Pengembangan kemitraan dan kelembagaan</p> <p>e. Sosialisasi hasil koordinasi tentang Pengembangan kemitraan dan kelembagaan</p> <p>f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Pengembangan kemitraan dan kelembagaan</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun setelah buku terbit</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>musnah kecuali rekomendasi permanen</p> <p>musnah</p> <p>musnah</p> <p>musnah</p> <p>musnah</p> <p>musnah</p>
4.	<p>Pengembangan Keuangan Mikro dan pemanfaatan teknologi tepat guna</p> <p>a. Rapat koordinasi tentang Keuangan Mikro dan pemanfaatan teknologi tepat guna</p> <p>b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang Keuangan Mikro dan pemanfaatan teknologi tepat guna</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>musnah kecuali rekomendasi permanen</p> <p>musnah</p>

c. Bahan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

1	2	3	4	5
	c. Bahan-bahan penyusunan Buku tentang Keuangan Mikro dan pemanfaatan teknologi tepat guna	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
	d. Monitoring dan evaluasi tentang Keuangan Mikro dan pemanfaatan teknologi tepat guna	1 tahun	2 tahun	musnah
	e. Sosialisasi hasil koordinasi tentang Keuangan Mikro dan pemanfaatan teknologi tepat guna	1 tahun	2 tahun	musnah
	f. Rekomendasi permohonan bantuan tentang Keuangan Mikro dan pemanfaatan teknologi tepat guna	1 tahun	2 tahun	musnah
VIII.	TUGAS KHUSUS / AD HOCK			
	a. Rapat koordinasi tentang tugas khusus	2 tahun	2 tahun	musnah kecuali rekomendasi permanen
	b. Bahan-bahan penyusunan Kebijakan tentang tugas khusus	2 tahun	2 tahun	musnah
	c. Bahan-bahan penyusunan proceeding, buku tentang tugas khusus	2 tahun setelah buku terbit	2 tahun	musnah
	d. Monitoring dan evaluasi tentang tugas khusus	1 tahun	2 tahun	musnah

e. Sosialisasi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

1	2	3	4	5
	e. Sosialisasi hasil koordinasi tentang tugas khusus	1 tahun	2 tahun	musnah
	f. Laporan dan rekomendasi pelaksanaan tugas khusus	1 tahun	2 tahun	musnah

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUNG LAKSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sugihartatmo